

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

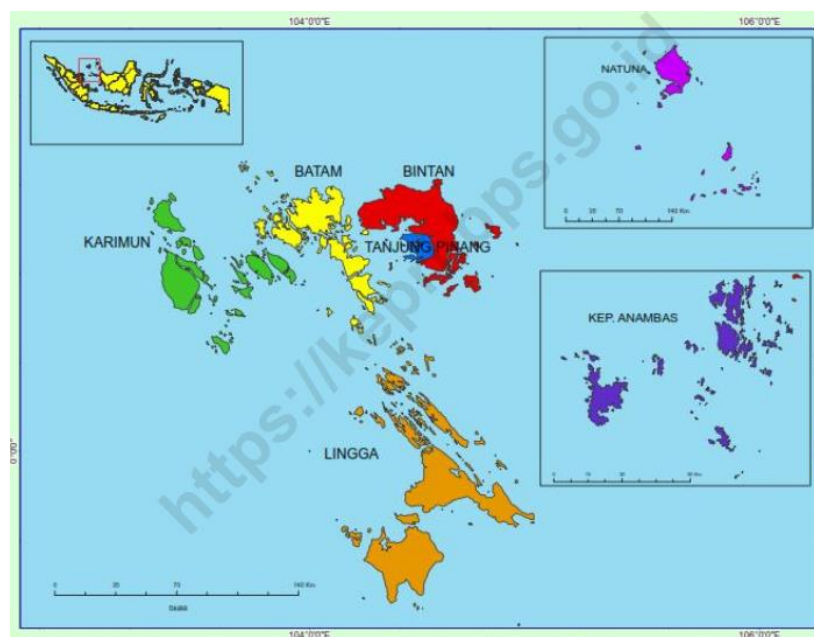
1. Letak Geografis Provinsi Kepulauan Riau.

Secara astronomis, Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 00⁰29' Lintang Selatan dan 04⁰40' Lintang Utara serta antara 103⁰22' Bujur Timur sampai dengan Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang berupa daratan adalah seluas 8.201,72 km². Berdasarkan data dari Biro Pemerintahan, Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 1.796 pulau.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kepulauan Riau dinilai sebagai provinsi yang memiliki posisi yang strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN. Selain itu, Provinsi Kepulauan Riau juga berbatasan langsung dengan beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Batas-batas wilayah tersebut meliputi: Bagian Utara berbatasan dengan Negara Vietnam dan Negara Kamboja; bagian Timur berbatasan dengan Negara Malaysia, Negara Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat; bagian Selatan berbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi; bagian Barat berbatasan dengan Negara Singapura, Negara Malaysia, dan Provinsi Riau.

Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan UU No. 25 Tahun 2002 ditetapkan sebagai provinsi di Indonesia dengan 4 Kabupaten dan 2 Kota, yakni: Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Lingga, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam. Namun pada tahun 2008 berdasarkan UU No. 33 Tahun 2008 terbentuk Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan hasil dari pemecahan wilayah Kabupaten Natuna.



GAMBAR 4. 1.
Peta Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2015, luas wilayah daratan masing-masing Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Karimun seluas 912,75 km²; Bintan seluas 1.318,21 km²; Natuna seluas 2.009,04 km²; Lingga seluas 2.266,77 km²; Kepulauan Anambas seluas 590,14 km²; Kota Batam seluas 960,25 km²; dan Kota Tanjungpinang seluas 144,56 km².

Ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau adalah Kota Tanjungpinang. Setiap daerah kabupaten/kota memerlukan transportasi laut

untuk sampai ke ibu kota provinsi . Jarak antara setiap daerah kabupaten/kota ke ibu kota provinsi dari yang terdekat antara lain:

Tanjungpinang-Tanjungpinang: 0 km

Bintan-Tanjungpinang: 20 km

Batam-Tanjungpinang: 44 km

Lingga-Tanjungpinang: 60 km

Karimun-Tanjungpinang: 76 km

Kepulauan Anambas-Tanjungpinang: 194 km

Natuna-Tanjungpinang: 440 km.

Kabupaten Natuna merupakan daerah terluar dari Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki wilayah perairan yang berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja (Badan Pusat Statistik, 2018).

2. Letak Geografis Kabupaten/Kota

a. Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang berada dekat dengan Pulau Bintan dengan letak geografis berada pada $0^{\circ}51'$ sampai dengan $0^{\circ}59'$ Lintang Utara dan $104^{\circ}23'$ sampai dengan $104^{\circ}34'$ Bujur Timur. Kantor Walikota Tanjungpinang berada di $0^{\circ}57'56,48''$ Lintang Utara dan $104^{\circ}26'27,62''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kota Tanjungpinang 238,50 km² dengan luas daratan 131,54 km² dan luas lautan 107,96 km². Luas wilayah Kota Tanjungpinang tersebut kemudian mengalami perubahan berdasarkan hasil dari Kegiatan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan dan Kecamatan, bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang yang difasilitasi oleh Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Berdasarkan perubahan, Luas wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 258,82 km² yang terdiri dari daratan seluas 150,86 km² dan lautan seluas 107,96 km² dengan keadaan geologis sebagian berbukit-bukit dan lembah sampai ke tepi laut. Kota Tanjungpinang memiliki 9 unit pulau yang terdiri dari 4 pulau berpenghuni dan 5 pulau kosong (Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, 2018).

b. Kota Batam

Kota Batam memiliki letak geografis yang sangat strategis karena berada pada jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan negara industri ASEAN yakni Singapura. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014, Kota Batam terletak antara 0°25'29" Lintang Utara sampai dengan 1°15'00" Lintang Utara dan 103°34'35" Bujur Timur sampai dengan 104°26'04" Bujur Timur.

Luas wilayah daratan Kota Batam mencapai 1.038,84 km² dan luas wilayah perairannya mencapai 2.791,09 km². Permukaan tanah di Kota Batam pada umumnya tergolong datar dengan variasi perbukitan yang memiliki ketinggian maksimum kurang lebih 160 meter di atas permukaan laut. Kota Batam memiliki jumlah pulau terbanyak ke dua setelah Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau yakni 373 pulau. Pulau-pulau terluar yang dimiliki Kota Batam antara lain Pulau Nipah,

Pulau Pelampong, Pulau Batu Berhenti dan Pulau Nongsa (Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2018).

c. Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun secara astronomis terletak antara $0^{\circ}35'$ Lintang Utara sampai dengan $1^{\circ}10'$ Lintang Utara dan $103^{\circ}30'$ Bujur Timur sampai dengan 104° Bujur Timur. Sementara letak koordinat kantor bupati Kabupaten Karimun berada pada $1^{\circ}01'58,93''$ Lintang Utara dan $103^{\circ}22'32,84''$ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas daratan dan perairan, yang memiliki luas secara keseluruhan kurang lebih 7.984 km^2 .

Kabupaten Karimun merupakan sebuah kabupaten kepulauan yang terdapat pulau besar dan kecil. Jumlah pulau yang terdata hingga saat ini adalah 250 unit pulau yang sudah bernama dengan 57 pulau yang sudah berpenghuni. Dua pulau terbesar yang menjadi pusat pemukiman dan sentra ekonomi adalah Pulau Karimun dan Pulau Kundur. Sementara pulau terluar di Kabupaten Karimun adalah Pulau Karimun Anak dan Pulau Iyu Kecil.

Kabupaten Karimun merupakan pulau dengan letak geografis yang strategis selain Kota Batam, karena Kabupaten Karimun secara administratif diapit oleh tiga negara. Posisi yang strategis ini berimbas pada pesatnya perkembangan Kabupaten Karimun. Status *Free Trade Zone* (FTZ) yang disandang pulau Karimun cukup berpengaruh, terutama terhadap kegiatan perekonomiannya. Kabupaten Karimun memiliki sebuah gunung yakni Gunung Jantan dengan ketinggian 478

meter di atas permukaan laut dan merupakan salah satu sumber mata air di Pulau Karimun (Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, 2018).

d. Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan terletak antara $1^{\circ}05'03,94''$ Lintang Utara dan $104^{\circ}28'56,23''$ Bujur Timur. Daerah Kabupaten Bintan merupakan Bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama "Papan Sunda". Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan daerah daratan pra tersier, wilayahnya membentang dari Semenanjung Malaysia dibagian Utara sampai Pulau Bangka dan Belitung di bagian Selatan. Luas wilayah daratan Kabupaten Bintan mencapai $1.320,10 \text{ km}^2$.

Kabupaten Bintan hingga saat ini memiliki 272 unit pulau yang terdiri dari 39 unit pulau berpenghuni dan 233 unit pulau kosong. Semua pulau tersebut sudah bernama, meskipun sebagian besar belum berpenghuni, pulau-pulau tersebut sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Kabupaten Bintan memiliki tiga pulau besar yakni Bintan, Tambelan, dan Mapur dan satu unit pulau terluar yakni Pulau Sentut (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, 2018).

e. Kabupaten Natuna

Secara astronomis, Kabupaten Natuna terletak pada titik koordinat antara $01^{\circ}18'00''$ Lintang Utara sampai dengan $06^{\circ}50'15''$ Lintang Utara dan $104^{\circ}48'30''$ Bujur Timur sampai dengan $110^{\circ}02'00''$ Bujur Timur. Sementara kantor Bupati Kabupaten Natuna terletak pada

titik koordinat 3^o56'28,62" Lintang Utara dan 108^o22'38,53" Bujur Timur.

Kabupaten Natuna mempunyai luas wilayah 224.684,59 km² yang terbagi menjadi wilayah daratan dengan luas sebesar 2.000,85 km² dan wilayah perairan dengan luas sebesar 222.683,74 km². Ibukota Kabupaten Natuna terletak di Kota Ranai. Kabupaten Natuna mempunyai 154 unit pulau dengan 27 pulau di antaranya sudah berpenghuni dan 127 pulau sisanya masih tergolong pulau kosong. Kabupaten Natuna mempunyai 7 pulau terluar, yaitu Pulau Kepala, Pulau Subi Kecil, Pulau Senoa, Pulau Sekatung, Pulau Sebetul, Pulau Semiun, dan Pulau Tokong Boro. Pulau Subi Kecil merupakan satu-satunya pulau terluar yang sudah berpenghuni, sedangkan sisanya belum berpenghuni dan digunakan masyarakat sebagai lahan perkebunan tanaman kelapa, karet, cengkeh, dan lain sebagainya.

Berdasarkan kondisi topografi, wilayah Kabupaten Natuna umumnya tanah berbukit dan bergunung batu. Namun dataran rendah dan landai juga banyak ditemukan di pesisir pantai. Ketinggian Kabupaten Natuna berkisar antara 2 meter sampai dengan 1.035 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 2 meter sampai dengan 5 meter (Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, 2018).

f. Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga secara astronomis terletak di antara 0^o20' Lintang Utara, 0^o40' Lintang Selatan, dan antara 104^o sampai dengan 105^o Bujur Timur. Kantor bupati Kabupaten Lingga sendiri terletak pada

titik kordinat antara 0°12'36,24" Lintang Selatan dan 104°36'18,79" Bujur Timur. Kabupaten Lingga memiliki luas wilayah daratan yang jauh lebih kecil daripada perairannya yakni 2.177,72 km², sementara luas wilayah perairannya mencapai 43.338,9962 km². Kabupaten Lingga merupakan wilayah kabupaten dengan pulau terbanyak yakni terdiri dari 531 unit pulau besar dan kecil. Namun hanya sekitar 95 pulau yang sudah berpenghuni, sedangkan 436 pulau sisanya belum berpenghuni dan sebagiannya dimanfaatkan sebagai lahan untuk kegiatan pertanian.

Berdasarkan topografinya, sebagian besar wilayah di Kabupaten Lingga merupakan perbukitan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan bahwa terdapat 73.947 ha daerah berbukit, sementara daerah datarnya hanya sekitar 11.015 ha. Wilayah Kabupaten Lingga pada umumnya berupa daerah dengan kemiringan yang cukup tinggi. Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Lingga dibagi menjadi enam kelas lereng, yaitu 0-2%, 2-8%, 8-15%, 15-25%, 25-40%, dan >40%. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lingga umumnya adalah podsolik merah kuning, litosol, dan organosol. Adapun lapisan tanahnya berstruktur remah sampai gumpal. Sementara lapisan bawahnya berselaput liat dan teguh. Jenis batu-batuannya yakni, batuan Pluton Asam (Acid Pluton) yang berupa batuan sejenis granit tersebar pada kawasan Gunung Daik di bagian barat Pulau Lingga, selain itu terdapat juga batuan endapan dari Zaman Pra Tersier yang tersebar di seluruh pulau Lingga (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga, 2018).

g. Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, secara astronomis Kabupaten Kepulauan Anambas terletak pada koordinat antara $2^{\circ}10'0''$ Lintang Utara sampai dengan $3^{\circ}40'0''$ Lintang Utara dan $105^{\circ}15'0''$ Bujur Timur sampai dengan $106^{\circ}45'0''$ Bujur Timur. Luas wilayah daratan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan adalah sekitar $590,14 \text{ km}^2$.

Apabila dilihat secara geografis, Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari gugusan pulau mulai dari yang berukuran besar hingga berukuran kecil. Keseluruhan pulau yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebanyak 238 pulau (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018)

B. Batas Wilayah Administrasi

Setiap Kabupaten/Kota yang terpisah oleh perairan ini memiliki batas administrasi. Berikut Batas-Batas administrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017.

TABEL 4. 1.
Batas Administrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/ Kota	Batas Administrasi			
	Utara	Timur	Selatan	Barat
Tanjungpinang	Kab. Bintan	Kab. Bintan	Kab. Bintan	Kota Batam
Batam	Laut Natuna Utara	Laut Natuna Utara	Kab. Bintan	Semenanjung Malaysia
Karimun	Philip Channel Singapura dan Semenanjung Malaysia	Kota Batam	Kec. Kateman, Kab. Indragiri Hilir	Kec. Tebing Tinggi, Kab. Bengkalis dan Kec. Kuala Kampar, Kab. Pelalawan
Bintan	Kab. Natuna	Prov. Kalimantan Barat	Kab. Lingga	Kota Tanjungpinang dan Kota Batam
Natuna	Laut Natuna Utara	Laut Natuna Utara	Kab. Bintan	Semenanjung Malaysia
Lingga	Kota Batam dan Laut Natuna Utara	Laut Indragiri Hilir	Laut Bangka dan Selat Berhala	Laut Natuna Utara
Kep. Anambas	Laut Natuna Utara/Vietnam	Kab. Natuna	Kab. Bintan	Laut Natuna Utara/Malaysia

Sumber: BPS Kabupaten/Kota dalam Angka 2018

Adanya penegasan batas-batas administrasi ini menjadi penting karena batas-batas administrasi akan memudahkan untuk mengetahui wilayah kerja dan perkembangan kegiatan pembangunan. Batas-batas administrasi lebih lanjut dirincikan ke dalam wilayah-wilayah administrasi guna penegasan pembagian tugas, hak, dan wewenang. Berikut wilayah-wilayah administrasi Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

TABEL 4. 2.

Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

Kabupaten/ Kota	Batas Administrasi				
	Kecamatan	Kelurahan	Desa	RW	RT
Tanjungpinang	4	18	0	168	680
Batam	12	64	0	514	2.056
Karimun	12	29	42	394	1.090
Bintan	10	15	36	199	614
Natuna	15	6	70	211	496
Lingga	10	7	75	44	121
Kep. Anambas	7	2	52	177	417

Sumber: BPS Kabupaten/Kota dalam Angka 2018

Wilayah-wilayah administrasi Kabupaten/Kota ini apabila dijumlahkan maka di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 7 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 70 Kecamatan, kemudian terbagi menjadi 141 kelurahan, 275 desa, serta 1.706 RW dan 5.474 RT.

C. Sektor Potensial

Provinsi Kepulauan Riau yang terbagi menjadi 7 Kabupaten/Kota dan terpisah menjadi beberapa pulau-pulau menjadikan Kepulauan Riau memiliki sektor potensial yang berbeda-beda di setiap Kabupaten/Kota yang ada. Sektor potensial pada setiap wilayah juga dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Sektor yang berkontribusi besar terhadap total PDRB belum tentu merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan yang besar untuk setiap tahunnya. Berikut beberapa sektor yang menjadi kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017.

TABEL 4.3
Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDRB Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

Kabupaten/ Kota	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)
Tanjungpinang	Konstruksi	31,32
Batam	Industri Pengolahan	54,96
Karimun	Perdagangan besar dan eceran	18,84
Bintan	Industri Pengolahan	40,19
Natuna	Pertambangan dan Penggalian	75,27
Lingga	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	22,26
Kepulauan Anambas	Pertambangan dan Penggalian	74,58

Sumber: BPS, Kabupaten/Kota dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui sektor-sektor yang memiliki persentase distribusi terbesar dari total PDRB setiap Kabupaten/Kota. Namun sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sektor yang berkontribusi besar terhadap total PDRB belum tentu merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan yang besar untuk setiap tahunnya. Berikut pergerakan pertumbuhan PDRB dari sektor yang memiliki persentase terbesar dari total PDRB.

1. Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan tabel 4.3, sektor yang mendominasi total PDRB Kota Tanjungpinang adalah sektor konstruksi dengan persentase 31,31% dari 100% PDRB. Laju pertumbuhan PDRB sektor konstruksi tahun 2015 sampai dengan 2017, atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan PDRB sektor konstruksi sebesar 4,77%, kemudian mengalami penurunan menjadi 2,88% pada tahun 2016. Penurunan terus

berlanjut hingga tahun 2017 yakni sebesar 1,81%, sehingga pertumbuhan PDRB sektor konstruksi mengalami pertumbuhan (-1,07%).

2. Kota Batam.

Berdasarkan tabel 4.3, sektor yang mendominasi total PDRB Kota Batam adalah sektor industri pengolahan dengan persentase lebih dari setengah total PDRB Kota Batam yaitu 54,96%. Adapun kondisi laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan tahun 2017, atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha mengalami penurunan. Hal ini dapat di lihat dari laju pertumbuhan tahun 2016 yang semula bernilai 4,64%, pada tahun 2017 pertumbuhan menurun menjadi 1,76%. Penurunan pertumbuhan ini dapat dipastikan bukan karena terjadinya inflasi, karena perhitungan atas dasar harga konstan tahun 2010, artinya mengabaikan perubahan-perubahan harga yang terjadi hingga tahun 2017.

3. Kabupaten Karimun.

Sektor andalan yang mendominasi total PDRB Kabupaten Karimun berdasarkan tabel 4.3 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan persentasi 18,84% dari total PDRB Kabupaten Karimun pada tahun 2017. Sementara laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor dari tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan mengalami penurunan menjadi 6,43%, kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,26% sehingga laju pertumbuhan menjadi 6,69%. Pada tahun 2017, laju pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor kembali

mengalami penurunan menjadi 6,48%. Meskipun begitu, kenaikan dan penurunan yang terjadi tidaklah signifikan sehingga laju pertumbuhan dapat dikatakan relatif stabil (Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, 2018).

4. Kabupaten Bintan.

Struktur perekonomian Kabupaten Bintan 40,19% didominasi oleh sektor industri pengolahan. Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Bintan terus mengalami peningkatan apabila dilihat dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan sektor industri pengolahan berada pada posisi 6,67% dari total PDRB, kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 6,05% dari total PDRB, dan posisi terkini sektor industri pengolahan Kabupaten Bintan juga mengalami peningkatan menjadi 7,28% dari total PDRB Kabupaten Bintan. Peningkatan-peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan Kabupaten Bintan.

5. Kabupaten Natuna.

Berdasarkan tabel 4.3, sektor yang mendominasi total PDRB Kabupaten Natuna adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan persentase lebih dari setengah total PDRB Kabupaten Natuna yaitu 75,27%. Besarnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Natuna tidak diikuti dengan laju pertumbuhan PDRB yang baik di sektor tersebut. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan penggalian (-0,75%). Penurunan laju

pertumbuhan PDRB sektor ini menindikasikan sektor pertambangan dan penggalian daerah Natuna berada pada kondisi yang buruk. Perlu adanya analisis lebih lanjut untuk melihat pertumbuhan sektor lain yang potensial untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna.

6. Kabupaten Lingga.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah sektor yang mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Lingga dengan besaran distribusi 22,26% dari total PDRB. Namun kondisi laju pertumbuhan sektor ini umumnya sama dengan yang terjadi pada Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Sektor yang mendominasi struktur perekonomian mengalami penurunan pertumbuhan PDRB. Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Lingga pada tahun 2017 hanya sebesar 2,48%, lebih kecil dari pertumbuhan tahun 2016 yaitu 3,82%. Penurunan pertumbuhan ini dapat dipastikan bukan karena terjadinya inflasi, karena perhitungan atas dasar harga konstan tahun 2010, artinya mengabaikan perubahan-perubahan harga yang terjadi hingga tahun 2017.

7. Kabupaten Kepulauan Anambas.

Struktur perekonomian Kabupaten Anambas 74,58% didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Besarnya distribusi persentase PDRB dari sektor pertambangan dan penggalian menggambarkan sektor tersebut sebagai sektor andalan yang ada di Kabupaten Anambas. Adapun kondisi laju pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan penggalian di Kepulauan Anambas tahun 2017, atas dasar harga konstan tahun 2010

menurut lapangan usaha mengalami penurunan. Hal ini dapat di lihat dari laju pertumbuhan tahun 2016 yang semula bernilai 2,47%, pada tahun 2017 pertumbuhan menurun menjadi (-0,39%).

Berdasarkan pemaparan 7 sektor yang mendominasi total PDRB 7 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, dapat disimpulkan bahwa sektor-sektor tersebut saat ini mulai mengalami perlambatan pertumbuhan PDRB. Hal tersebut menggambarkan bahwa nilai tambah ekonomi Provinsi Kepulauan Riau berada pada kondisi yang memburuk, terlihat dari laju pertumbuhan sektor-sektor yang mendominasi total PDRB yang kian melamban bahkan pertumbuhan negatif.

Kemudian perlu di lihat pula, sektor-sektor lain yang berpotensi memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Sektor-sektor tersebut adalah sektor dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi meskipun total nilai produknya belum mampu mendominasi total PDRB setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Berikut beberapa sektor potensial yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2017.

Tabel 4.4 berikut memaparkan bahwa terdapat sektor-sektor potensial dengan laju pertumbuhan yang terbilang tinggi meskipun sektor-sektor tersebut bukan merupakan sektor dengan persentase distribusi PDRB yang mampu mendominasi total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

TABEL 4. 4
Laju Pertumbuhan PDRB terbesar Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017
(berdasarkan sektor ekonomi)

Kabupaten/ Kota	Sektor	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Tanjungpinang	Pengadaan Listrik dan Gas	11,32
Batam	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,83
Karimun	Pengadaan Listrik dan Gas	13,33
Bintan	Konstruksi	9,64
Natuna	Informasi dan Komunikasi	9,11
Lingga	Konstruksi	18,31
Kepulauan Anambas	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,91

Sumber: Kabupaten/Kota dalam Angka Tahun 2018

Beberapa sektor kecil dengan pertumbuhan PDRB yang tertinggi pada tahun 2017 berdasarkan tabel 4.4 adalah sektor konstruksi di Kabupaten Lingga, sektor pengadaan listrik dan gas di Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang.

D. Gambaran Umum Variabel Operasional

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari mengelola/memanfaatkan berbagai sumber daya potensial yang ada di daerah. PAD dapat bersumber dari hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, hasil usaha perusahaan milik daerah (BUMD), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah seperti hasil penjualan aset daerah dan jasa giro. PAD umumnya dijadikan tolak ukur dari kemandirian suatu daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut.

TABEL 4.5
 Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota
 di Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun 2011-2017

TAHUN	KABUPATEN/KOTA						
	Kabupaten Karimun	Kabupaten Bintan	Kabupaten Natuna	Kabupaten Lingga	Kabupaten Kepulauan Anambas	Kota Batam	Kota Tanjungpinang
2011	240.819.873.681	136.232.925.611	42.186.498.863	20.579.785.919	38.407.262.789	325.551.392.754	68.012.880.682
2012	242.500.827.679	136.751.503.920	38.920.353.033	17.423.239.129	34.108.387.819	413.178.934.109	82.465.700.951
2013	204.438.311.483	133.959.953.600	28.033.510.000	17.520.000.000	40.777.120.000	511.135.469.396	83.818.759.250
2014	310.386.407.101	190.843.040.464	39.404.360.299	21.010.343.891	21.489.585.793	779.944.837.451	125.170.740.485
2015	360.641.751.643	186.630.240.775	35.211.059.623	20.305.789.397	17.218.368.878	836.713.858.342	122.893.490.241
2016	310.608.407.497	178.384.571.161	43.657.341.397	21.000.000.000	24.298.537.411	891.918.479.510	114.004.002.500
2017	348.757.543.449	198.010.321.117	74.001.744.354	22.072.325.000	22.414.833.952	1.160.200.676.360	116.448.594.500
Rata-rata pertumbuhan PAD (%)	8,57	7,53	14,62	1,72	-4,24	24,53	10,89

Sumber: BPS, Kabupaten/Kota dalam angka (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.5 wilayah Kabupaten/Kota dengan total PAD dan rata-rata pertumbuhan terbesar adalah Kota Batam. Pada tahun 2017 PAD Kota Batam mencapai Rp1.160.200.676.360,- dengan rata-rata pertumbuhan 24,53% selama 6 tahun terakhir. Kota Batam sendiri merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau dengan julukan terkenalnya sebagai “Kota Industri”. Kabupaten/Kota yang memperoleh total PAD terbesar kedua adalah Kabupaten Karimun, dengan total PAD tahun 2017 sebesar Rp348.757.543.449,-.

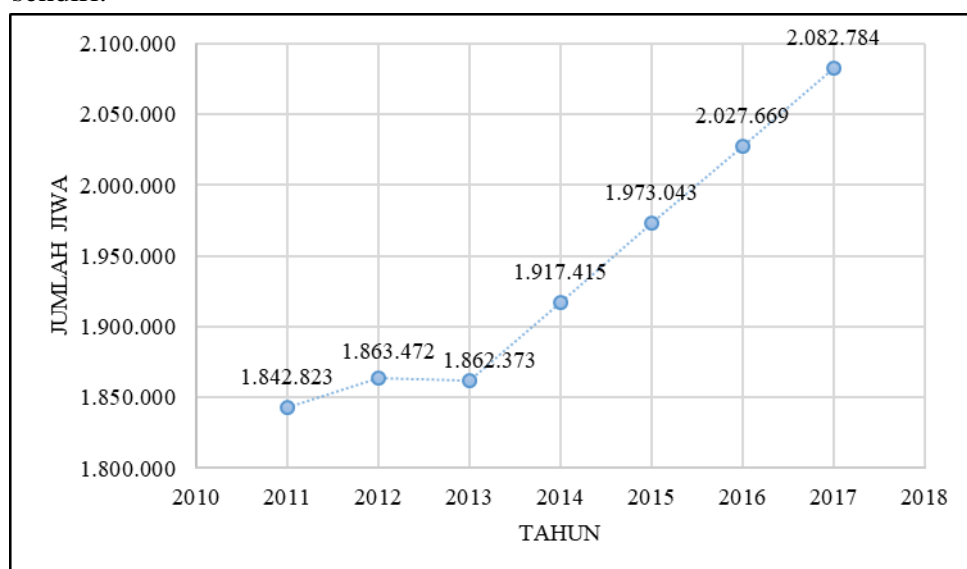
Meskipun Kabupaten Karimun memperoleh total PAD terbesar kedua setelah Kota Batam, kondisi PAD setiap tahunnya yang cenderung fluktuatif membuat rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Karimun berada pada posisi ke empat dari tujuh Kabupaten/Kota yang ada. Pertumbuhan rata-rata PAD terbesar kedua berada di Kabupaten Natuna dengan perolehan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,62% selama enam tahun terakhir. Kemudian Kabupaten/Kota dengan perolehan PAD terendah berdasarkan tabel di atas adalah Kabupaten Lingga dengan total PAD tahun 2017 sebesar Rp22.072.235.000,- dengan rata-rata pertumbuhan 1,72% dalam enam tahun terakhir. Sementara Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Kabupaten dengan total PAD kedua terendah setelah Kabupaten Lingga dan berada pada kondisi rata-rata pertumbuhan terburuk dalam enam tahun terakhir dengan besaran rata-rata pertumbuhan (-4,24%).

Tiga Kabupaten/Kota yang memperoleh PAD tertinggi yaitu Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten/Kota yang saat ini menyandang status sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia (*Indonesia Free Trade Zone*). Status-status tersebut diharapkan dapat menopang perekonomian masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

2. Jumlah penduduk.

Berdasarkan studi pustaka dan studi empiris pada BAB 2, diketahui jumlah penduduk merupakan salah satu faktor produksi yang berpengaruh

bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Data jumlah penduduk menjadi penting bagi pengambil kebijakan dalam merencanakan dan melakukan evaluasi pembangunan. Menurut Hudiyanto (2015), pada dasarnya pertumbuhan ekonomi salah satunya bersumber dari jumlah penduduk atau sumberdaya insani (*population, human resources*) atau jumlah angkatan kerja, atau dalam bahasa mikro disebut sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja di nilai sebagai sumber produksi karena tanpa tenaga kerja (sejumlah penduduk) maka sumber daya alam dan modal tidak bisa memproduksi sendiri.



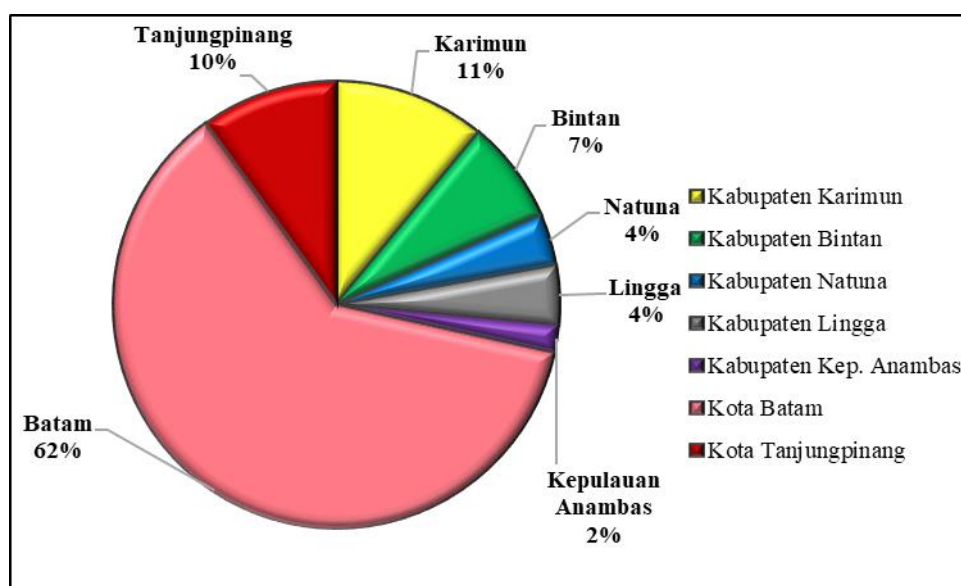
Sumber: BPS, Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2018 (data diolah)

GAMBAR 4. 2

Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2017

Berdasarkan gambar 4.2 dapat di lihat bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2013 jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau berfluktuasi dimana terjadi kenaikan jumlah penduduk pada tahun 2012 yang selanjutnya mengalami penurunan sekitar 1.000 jiwa sehingga pada tahun 2013 jumlah penduduk menurun menjadi 1.862.373 jiwa. Kemudian

sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 penduduk di Provinsi Kepulauan Riau terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai angka 2.082.784 jiwa. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil akumulasi dari seluruh penduduk tingkat Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau.



Sumber: BPS, Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2018 (data diolah)

GAMBAR 4. 3

Persentase Persebaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

Jumlah penduduk tahun 2017 sebesar 2.082.784 jiwa tersebut berasal dari 7 Kabupaten/Kota yang kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh gambar 4.3. Berdasarkan gambar grafik 4.3 diketahui bahwa Kota Batam merupakan kota yang mendominasi total jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau. Persentase jumlah penduduk Kota Batam mencapai 62% dari total jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Karimun dengan persentase jumlah penduduk sebesar 11 persen. Sementara ibukota Provinsi Kepulauan Riau berada pada posisi

ketiga dengan persentase jumlah penduduk sebesar 10 % dari total jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian 17% jumlah penduduk sisanya tersebar di 4 Kabupaten/Kota lainnya, yaitu 7% terdapat di Kabupaten Bintan, masing-masing 4 % di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga, serta 2% terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB merupakan suatu gambaran kemampuan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dalam menciptakan nilai tambah ekonomi pada kurun waktu tertentu, umumnya satu tahun. Pada penelitian ini peneliti berusaha memaparkan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dari sisi pendekatan lapangan usaha. Pendekatan lapangan usaha adalah salah satu cara penyusunan PDRB yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh komponen nilai tambah bruto baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh tujuh belas sektor (lapangan usaha). Besaran kontribusi dari setiap sektor terhadap total PDRB ataupun besaran pertumbuhan PDRB setiap sektor merupakan tolak ukur dari pembangunan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Pertumbuhan PDRB yang besar, apabila diimbangi oleh kebijakan-kebijakan desentralisasi fiskal yang tepat, maka akan tercipta pembangunan ekonomi daerah yang kokoh. Berikut dipaparkan perkembangan jumlah PDRB dan pertumbuhan rata-rata PDRB dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2011 sampai dengan 2017.

TABEL 4. 6
PDRB Atas Dasar Lapangan Usaha Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2017

TAHUN	KABUPATEN/KOTA						
	Kab. Karimun	Kab. Bintan	Kab. Natuna	Kab. Lingga	Kab. Kep. Anambas	Kota Batam	Kota Tanjungpinang
2011	5.872.367.800.000	9.501.063.100.000	11.345.200.700.000	1.981.219.460.000	11.162.012.890.000	68.621.399.000.000	9.784.368.200.000
2012	6.297.816.600.000	10.126.483.000.000	12.437.318.600.000	2.111.651.710.000	11.595.839.040.000	73.698.072.650.000	10.479.811.900.000
2013	6.744.250.000.000	10.741.920.000.000	13.009.830.000.000	2.256.830.000.000	11.964.650.000.000	78.991.100.000.000	11.294.830.000.000
2014	7.207.300.000.000	11.424.370.000.000	13.585.410.000.000	2.373.210.000.000	12.407.910.000.000	84.644.070.000.000	11.891.260.000.000
2015	7.678.310.000.000	12.013.390.000.000	14.115.270.000.000	2.492.750.000.000	12.784.250.000.000	90.457.740.000.000	12.568.740.000.000
2016	8.152.860.000.000	12.726.960.000.000	14.538.930.000.000	2.529.110.000.000	13.155.240.000.000	95.369.700.000.000	13.202.950.000.000
2017	8.594.070.000.000	13.364.820.000.000	14.665.420.000.000	2.691.280.000.000	13.142.450.000.000	97.359.730.000.000	13.551.170.000.000
TOTAL	50.546.974.400.000	79.899.006.100.000	93.697.379.300.000	16.436.051.170.000	86.212.351.930.000	589.141.811.650.000	82.773.130.100.000
Rata-rata pertumbuhan PDRB(%)	6,55	5,85	4,40	5,25	2,77	6,02	5,59

Sumber: BPS, Kabupaten/Kota dalam angka (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.6 wilayah Kabupaten/Kota dengan total PDRB terbesar setiap tahunnya adalah Kota Batam. Pada tahun 2017 PDRB Kota Batam mencapai Rp97.359.730.000.000,- dengan rata-rata pertumbuhan 6,02% selama 6 tahun terakhir. Adapun sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kota Batam adalah sektor industri pengolahan. Kemudian Kabupaten/Kota yang memperoleh total PDRB terbesar kedua setiap tahunnya adalah Kabupaten Natuna, dengan total PDRB pada tahun 2017 sebesar Rp14.665.420.000.000,- dengan rata-rata pertumbuhan 2,77%. Sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Natuna adalah

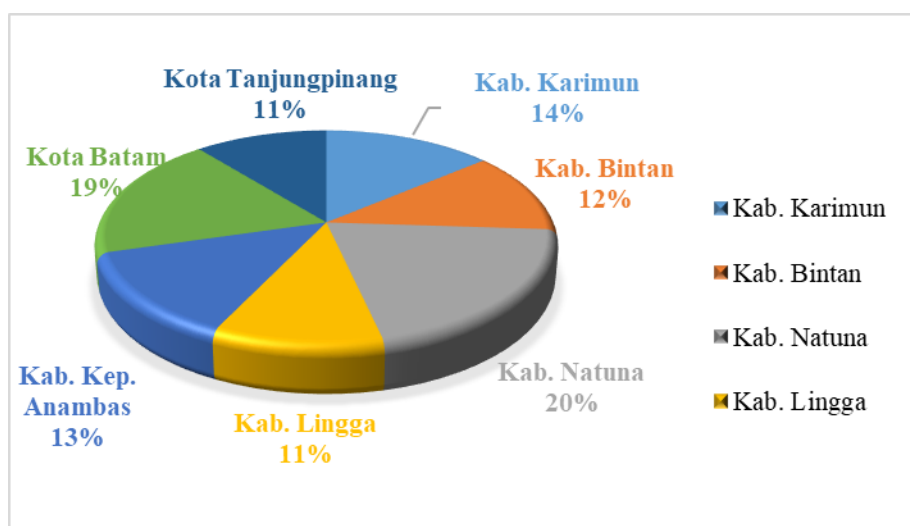
sektor pertambangan dan penggalian. Sementara itu, Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan rata-rata PDRB tertinggi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir adalah Kabupaten Karimun dengan pertumbuhan PDRB sebesar 6,55%. Kemudian diikuti oleh Kota Batam dengan pertumbuhan rata-rata PDRB sebesar 6,02% dan pertumbuhan rata-rata PDRB tertinggi pada posisi ketiga diraih oleh ibukota provinsi Kepulauan Riau yaitu Kota Tanjungpinang dengan pertumbuhan rata-rata PDRB sebesar 5,59%.

Secara umum PDRB seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun selama perkembangannya terdapat pula Kabupaten/Kota yang terkatogeri sebagai Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan rata-rata PDRBnya tergolong kecil atau lamban. Berdasarkan tabel 4.6 dapat pula dilihat tiga Kabupaten/Kota dengan total PDRB setiap tahunnya tergolong kecil. Pada posisi pertama terdapat Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pertumbuhan rata-rata PDRB 2,77%, meskipun demikian total PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas cukup besar yaitu berada pada posisi terbesar ke 3 setelah Kota Batam dan Kabupaten Natuna. Kemudian pada posisi kedua yaitu Kabupaten Natuna dengan rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar 4,40%. Terakhir pada posisi ketiga pertumbuhan rata-rata PDRB terkecil yaitu Kabupaten Lingga dengan pertumbuhan rata-rata PDRB sebesar 5,25%. Kabupaten Lingga juga tergolong sebagai Kabupaten/Kota dengan total PDRB dengan total PDRB pada tahun 2017 yang hanya

sebesar Rp2.691.280.000.000,-. Sementara 6 Kabupaten/Kota lainnya mampu menghasilkan PDRB di atas 5 triliun untuk setiap tahunnya.

4. Pengeluaran Pemerintah

Khusus bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia, kegiatan pemerintah pada umumnya selalu mengalami peningkatan dikarenakan pemerintah merupakan pelopor dan pengendali pembangunan ekonomi. Peningkatan kegiatan pemerintah dapat dilihat langsung dari besaran proporsi dari pengeluaran pemerintah yang termuat dalam laporan realisasi APBN dalam lingkup negara dan laporan realisasi APBD dalam lingkup Provinsi atau Kabupaten/Kota. Maknanya pengeluaran pemerintah merupakan indikator yang menjadi tolak ukur dari banyaknya atau besarnya kegiatan pemerintahan yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah (Suparmoko, 1991). Berikut proporsi pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011-2017.

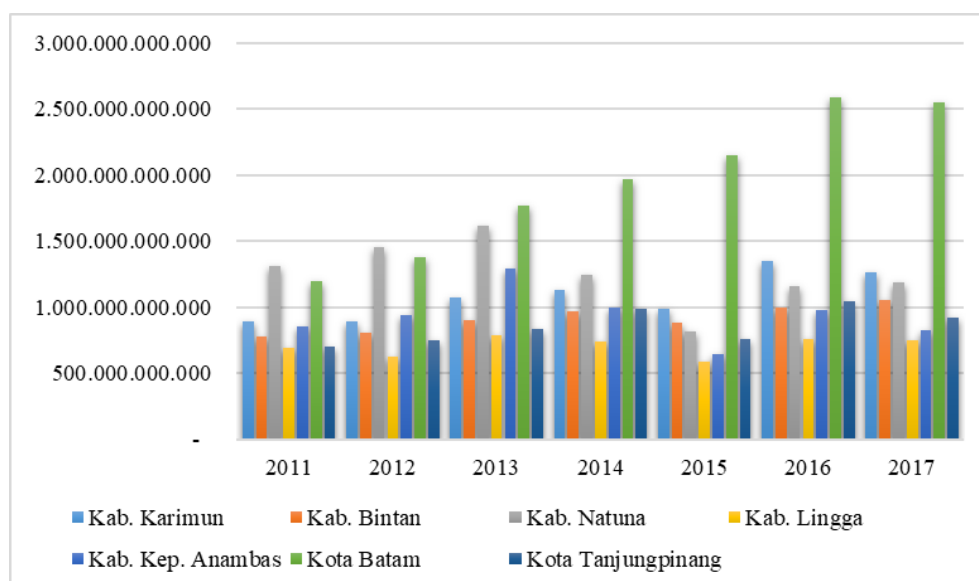


Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

GAMBAR 4. 4

Proporsi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2017

Berdasarkan gambar 4.4, diketahui bahwa selama kurun waktu 7 tahun terakhir, wilayah Kabupaten/Kota dengan proporsi pengeluaran terbesar pertama adalah Kabupaten Natuna yaitu sebesar 20%, Kota Batam sebesar 19%, dan Kabupaten Karimun sebesar 14% dari total pengeluaran se-Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Kemudian wilayah Kabupaten/Kota dengan proporsi pengeluaran pemerintah terkecil pertama adalah Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang dengan besaran 11% dan selanjutnya Kabupaten Bintang dengan besaran 12% dari total pengeluaran se-Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.



Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

GAMBAR 4.5

Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2017

Grafik pada gambar 4.5 menggambarkan perkembangan total pengeluaran pemerintah 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau selama 7 tahun terakhir. Apabila dilihat dari besaran pengeluaran

pemerintah tiap Kabupaten/Kota per tahunnya sejak tahun 2011 sampai dengan 2017, maka pengeluaran terbesar dan cenderung meningkat untuk setiap tahunnya adalah pengeluaran pemerintah Kota Batam. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Natuna dan Kabupaten Karimun. Kemudian pengeluaran terkecil dan cenderung konstan untuk setiap tahunnya adalah pengeluaran pemerintah Kabupaten Lingga.

